

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perguruan Tinggi

Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi menguraikan bahwa perguruan tinggi merupakan wadah pembelajaran bagi mahasiswa dan masyarakat yang melahirkan calon pemimpin bangsa, perguruan tinggi merupakan pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pusat kajian kebijakan dan kekuatan moral untuk mencari dan menemukan kebenaran serta menjadi pusat pengembangan peradaban suatu bangsa, Perguruan tinggi dapat berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas.

Pengelolaan perguruan tinggi dilaksanakan menurut prinsip akuntabilitas, transparansi, nirlaba, penjaminan mutu, efektivitas dan efisiensi. Kewajiban pengelolaan suatu perguruan tinggi terdiri dari bidang akademik dan non akademik. Pengelolaan di bidang akademik meliputi penetapan norma, kebijakan operasional dan pelaksanaan Tridharma (pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, pengabdian kepada masyarakat). Pengelolaan dibidang non akademik meliputi pelaksanaan organisasi, keuangan, kemahasiswaan, ketenagaan, dan sarana prasarana.

Perguruan tinggi merupakan organisasi nirlaba yang tidak bertujuan memperoleh keuntungan (*profit oriented*), namun harus memperoleh keuntungan

(*surplus*) demi menjalankan kegiatan operasionalnya dan mengembangkan organisasinya menjadi lebih baik, sehingga dapat bertahan untuk kelangsungan hidupnya.

Tamin (2019) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) merupakan institusi pendidikan tinggi milik masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan mandat akademik yang diberikan pemerintah dan pendelegasian wewenang pengelolaan sumber daya dari Yayasan, untuk melaksanakan pendidikan yang bermutu dan manajemen yang akuntabel yang memerlukan pengaturan tata kelola PTS yang benar dan baik (*Good University Governance*).

2.2 *Good University Governance*

Menurut Peraturan Menteri Keuangan No: 119/PMK.05/2007 pasal 5, pola tata kelola merupakan peraturan internal universitas yang memutuskan bahwa struktur organisasi, metode kerja, pengelompokan fungsi yang masuk akal, ketersediaan dan pengembangan SDM serta efisiensi biaya tercakup dalam organisasi dan tata laksana; akuntabilitas mencakup kebijakan model/prosedur, media responsibilitas, dan periodisasi pelaporan pertanggungjawaban program, kegiatan dan keuangan guna mencapai tujuan yang telah dirancang, dan keterbukaan atau transparansi, dengan menerapkan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kemudahan memperoleh informasi bagi yang membutuhkan.

Good University Governance (GUG) adalah turunan atau penyesuaian dari *Good Corporate Governance (GCG)* yang merupakan struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai usaha dalam menambah *value* perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka yang panjang, dengan tetap memerhatikan kepentingan pemangku kepentingan lainnya, berdasarkan moral, etika, budaya dan aturan lain yang berlaku. (Harjono Muljo et al., 2014). *Good University Governance* merupakan serangkaian mekanisme untuk mengarahkan atau mengendalikan suatu organisasi perguruan tinggi agar melaksanakan operasional organisasinya sesuai dengan harapan pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Wijatno (2009) dalam Slamet, dkk (2015) penerapan prinsip GUG dibagi menjadi beberapa aspek diantaranya Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung jawab, Kemandirian serta Kesetaraan dan Kewajaran.

2.2.1 Transparansi (Keterbukaan informasi)

Yang dimaksud dengan prinsip transparansi adalah keterbukaan dan kemampuan menyajikan informasi yang relevan secara akurat dan tepat waktu bagi pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Keterbukaan adalah asas yang menjamin kemampuan berinteraksi atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan suatu organisasi, di antara lain informasi berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan, pedoman proses penyusunan dan pelaksanaannya, serta tujuan yang dicapai (Duaji, Noverman 2012). Menurut Wijatno (2009) dalam Larasati dkk (2018) perguruan tinggi mesti dan dapat menerapkan prinsip keterbukaan bagi pemangku kepentingan secara memadai, akurat

dan tepat waktu dalam bidang keuangan, sistem dan mekanisme penerimaan mahasiswa baru, prosedur dan sistem akuntansi, pelaporan keuangan, rekrutmen dosen atau tenaga pengajar dan staf, seleksi manajemen struktural, seleksi pengurus dan informasi-informasi penting lainnya kepada

2.2.2 Akuntabilitas

Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilandaskan pada catatan atau laporan tertulis yang bersifat eksternal atau dari luar, sedangkan responsibilitas juga diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilandaskan oleh kebijakan yang bersifat internal atau dari dalam (Mardiasmo 2006:3 dalam Elkha 2020). Akuntabilitas diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan suatu organisasi untuk mencapai tujuan atau target yang telah ditetapkan secara periodik (Mardiasmo 2006:3). Dalam pengelolaan kelembagaan di sebuah perguruan tinggi, akuntabilitas adalah kemampuan dan komitmen untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan perguruan tinggi kepada semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas perguruan tinggi merupakan bentuk tanggung jawab perguruan tinggi kepada masyarakat yang meliputi akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik yang dilaporkan setiap tahunnya. Perguruan tinggi memiliki kewajiban membuat pertanggungjawaban secara periodik mengenai kegiatan, keberhasilan serta kegagalan di institusi tersebut.

2.2.3 Tanggungjawab (*Responsibility*)

Responsibility memiliki makna adanya kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang diberikan kepada seseorang dengan baik. Menurut Ratminto dan Winarsih

(2007) pada jurnal Utama, Daniel & Rediana (2014) responsibilitas adalah takaran untuk mengukur seberapa besar tingkat konsistensi antara penyelenggaraan pemerintah dengan peraturan dan sistem yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Lenvine (1990) dalam Puspitasari (2021) responsibilitas menjabarkan apakah penyelenggaraan program-program organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip administrasi yang tepat atau sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh organisasi, baik yang eksplisit atau tegas maupun implisit (Dwiyanto, 2008) dalam jurnal Studi Kepemerintahan (2021). Setiap individu dalam organisasi harus bertanggung jawab atas segala tindakannya sesuai dengan *job description* yang telah ditetapkan.

2.2.4 Independensi

Independensi adalah sikap mandiri yang dimiliki seseorang dimana dia tidak memihak pada siapapun, bebas dari benturan kepentingan dan obyektif dalam mengerjakan apa yang jadi pekerjaannya. Independensi dalam audit artinya ketidakberpihakan dan/atau penolakan segala campur tangan dari pihak manapun dalam pelaksanaan apa yang jadi pekerjaannya. (Yayuk & Nur, 2014). Pihak Yayasan dan pengelola perguruan tinggi dalam melaksanakan peran dan tugasnya harus bebas dari segala bentuk benturan kepentingan yang berpotensi untuk muncul, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dalam pengelolaan kelembagaan dilakukan secara independen, bebas dari segala bentuk tekanan dari pihak lain, dan dipastikan keputusan dibuat demi kepentingan kemajuan perguruan tinggi.

2.2.5 *Fairness* (Kesetaraan atau Kewajaran)

Kewajaran (*fairness*), adalah penerapan asas kesetaraan dan keberimbangan dengan memberikan hak setiap *stakeholder* dengan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fairness adalah Perlakuan yang adil dan berimbang bagi para pemangku kepentingan. Dalam hal ini pemangku kepentingan yaitu mahasiswa, masyarakat, para dosen karyawan non akademis, serta pengurus yayasan. Dalam melaksanakan kegiatannya, organisasi harus senantiasa berlaku adil dan berimbang terhadap kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran

2.2.6 Efektivitas dan Efisiensi pengelolaan perguruan tinggi

Menurut Nurmayunita (2009) Efektivitas adalah suatu konsep yang digunakan untuk melihat gambaran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Menurut Sedarmayanti (2014:22) dalam Mahardita (2017) Efisiensi di gunakan takaran tingkat pemanfaatan sumber daya yang ada dalam suatu program atau kegiatan. Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara masukan (*input*) dan hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dimanfaatkan (*output*), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas Semakin hemat atau sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Proses yang efisien ditandai dengan perbaikan proses sehingga menjadi lebih murah dan lebih cepat Dalam pengelolaannya perguruan tinggi diharapkan memanfaatkan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi agar tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan.

2.3 Organisasi Mahasiswa

Organisasi mahasiswa adalah organisasi intra perguruan tinggi, dibentuk dan dibawah oleh bidang kemahasiswaan suatu perguruan tinggi. Organisasi kemahasiswaan paling memiliki fungsi untuk: (a) memberikan wadah kegiatan bagi mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi dalam diri mahasiswa; (b) mengembangkan kreativitas, keterampilan, kepekaan, cara berpikir kritis, menumbuhkan keberanian, dan jiwa kepemimpinan, serta rasa kebangsaan; (c) memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan (d) mengembangkan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi wajib mendampingi dan melatih mahasiswa serta memberikan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan organisasi mahasiswa.

2.4 Teori *Stakeholder*

Stakeholders adalah orang-orang yang memiliki kepentingan atau ketertarikan pada topik tertentu (Biset, 1998 dalam George, 2013). Sedangkan Grimble and Wellard (1996) dalam George (2013) melihat *stakeholders* dari segi kepentingan dan dampak yang mereka miliki. Dari dua definisi tersebut dapat di tarik kesimpulan bahwa *stakeholders* adalah sekelompok orang yang memiliki suatu ketertarikan kepentingan serta memiliki pengaruh terhadap suatu organisasi. Teori ini muncul karena ada kesadaran dan pemahaman bahwa dalam suatu organisasi pasti memiliki *stakeholders*, yaitu pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada suatu organisasi. Kata

"*stakeholder*" muncul pertama dalam sebuah memorandum internal pada Lembaga Penelitian Stanford (SRI:Stanford Research Institute) pada tahun 1963. Istilah *stakeholder* ini muncul menantang gagasan pemegang saham (*stockholders*) merupakan satu-satunya kelompok kepada siapa organisasi perlu bertanggung jawab (Muhsin, 2017).

Teori *stakeholder* menyatakan bahwa suatu organisasi bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri melainkan harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya (pemegang saham, pemerintah, komunitas, konsumen, masyarakat, karyawan, dan pihak lainnya). Deegan (2004) menyatakan bahwa *stakeholder theory* adalah "Teori yang menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas perusahaan yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Para *stakeholder* juga dapat memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan tidak dapat memainkan peran secara langsung dalam suatu organisasi. Organisasi memiliki kewajiban untuk melaporkan segala aktivitas atau pengelolaan organisasi terhadap *stakeholder*."

Deegan dan Unerman (2011) dalam Fachrunnisa (2021) Stakeholder Theory dibagi menjadi dua kategori yakni *stakeholder* kategori etis dan kategori manajerial. Dalam perspektif cabang teori *stakeholder* etis, menyatakan bahwa semua *stakeholder* mempunyai hak untuk diperlakukan secara sama rata dan adil oleh organisasi atau, mengesampingkan besarnya dampak antar *stakeholder* yang satu dengan *stakeholder* yang lain (Deegan dan Unerman, 2011 dalam Fachrunnisa (2021)). Sedangkan perspektif teori *stakeholder* cabang manajerial, beranggapan bahwa semakin penting

stakeholder bagi organisasi semakin banyak usaha yang harus dikeluarkan untuk mengelola hubungannya dengan stakeholder ini.

Stakeholder dapat dilihat dalam 3 pendekatan diantaranya :

3. Deskriptif atau empiris

Pendekatan deskriptif atau empiris adalah deskripsi realitas bagaimana suatu organisasi beroperasi. Teori *stakeholder* dalam pendekatan deskriptif bertujuan untuk memahami bagaimana manajemen menangani kepentingan *stakeholder* dan tetap menjalankan kepentingan organisasi.

4. Instrumental

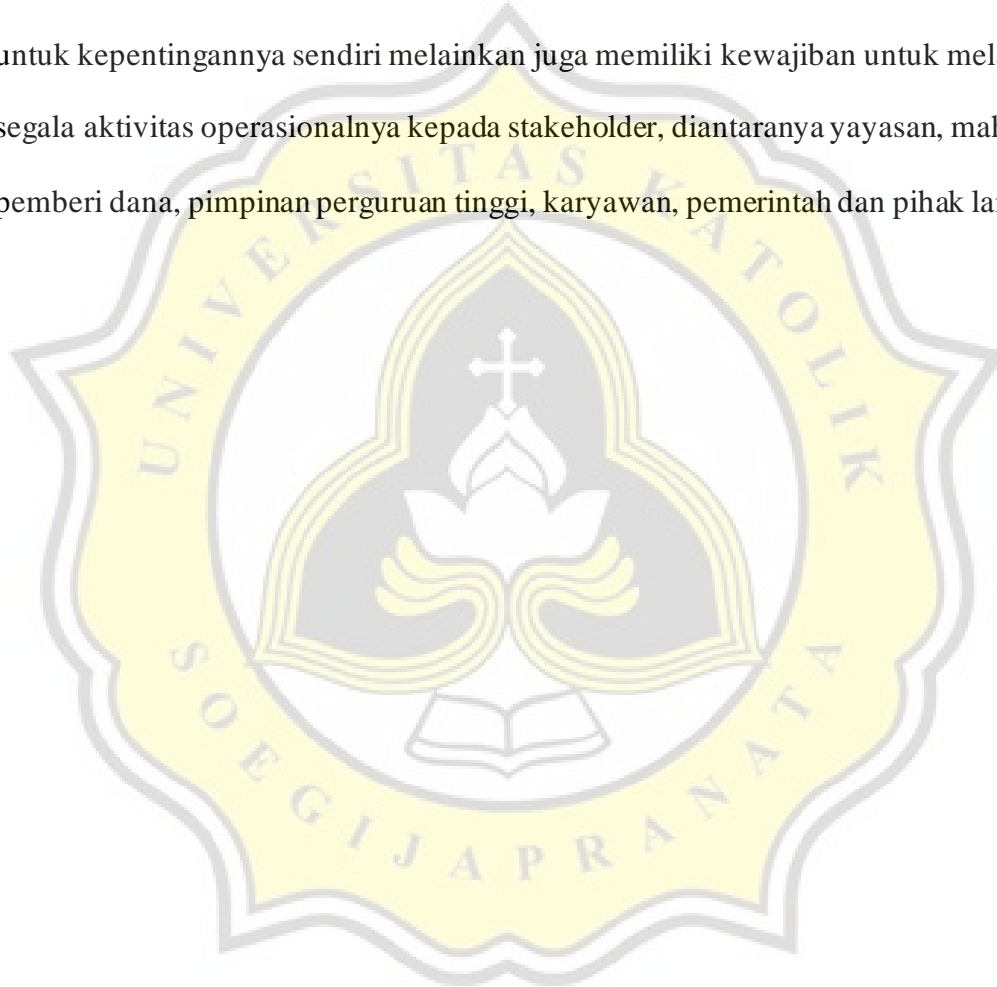
Teori *stakeholder* dalam pendekatan instrumental menjelaskan, salah satu taktik pihak manajemen perusahaan untuk mendapatkan kinerja perusahaan yang lebih baik adalah dengan mementingkan para pemangku kepentingan. Hal ini didukung oleh bukti berdasarkan pengamatan Lawrence & Weber (2008) dalam Stephanus (2014), yang menunjukkan bahwa kira-kira lebih dari 450 perusahaan yang menyatakan komitmennya terhadap *stakeholder* dalam pelaporan tahunannya mempunyai kinerja keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai komitmen.

5. Normatif

Teori *stakeholder* dalam pendekatan normatif menyatakan bahwa setiap orang atau kelompok atau organisasi yang telah memberikan dampak atau pengaruh terhadap *value* suatu perusahaan memiliki hak moral untuk

menerima penghargaan dari organisasi dan ini merupakan hal yang harus dilakukan manajemen untuk memberikan hak para *stake holder*.

Teori *stakeholder* berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan perguruan tinggi karena perguruan tinggi merupakan suatu organisasi yang beroperasi bukan hanya untuk kepentingannya sendiri melainkan juga memiliki kewajiban untuk melaporkan segala aktivitas operasionalnya kepada stakeholder, diantaranya yayasan, mahasiswa, pemberi dana, pimpinan perguruan tinggi, karyawan, pemerintah dan pihak lainnya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

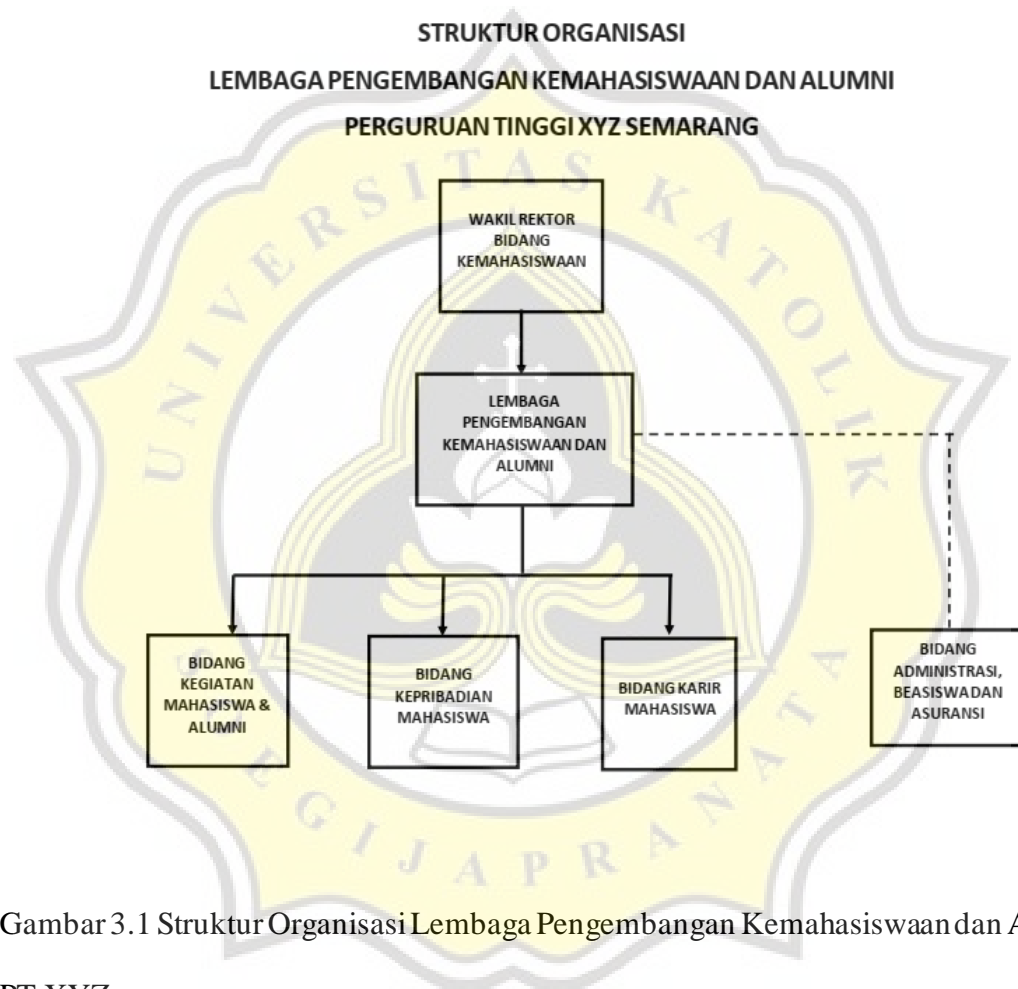
3.1 Objek Penelitian dan lokasi penelitian

Objek penelitian ini adalah Lembaga pengembangan kemahasiswaan perguruan tinggi XYZ yang berlokasi di kota Semarang. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data perguruan tinggi dan narasumber, maka dalam penelitian ini nama perguruan tinggi disamarkan menjadi perguruan tinggi XYZ.

3.2 Gambaran Umum

Perguruan tinggi XYZ merupakan salah satu universitas terbaik di kota Semarang dengan akreditasi A yang memiliki 10 fakultas dan 28 program studi. Kelembagaan kemahasiswaan dan alumni merupakan lembaga yang dinaungi oleh wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan. Lembaga pengembangan kemahasiswaan dan alumni perguruan tinggi XYZ terbagi menjadi beberapa bagian yang membantu pengelolaan kemahasiswaan menjadi lebih fokus dan baik, diantaranya pusat kegiatan mahasiswa yang mengurus terkait kegiatan organisasi mahasiswa, unit kemahasiswaan yang mengurus hal-hal berkaitan dengan administrasi kemahasiswaan, beasiswa dan asuransi, pusat kepribadian mahasiswa yang fokus

terhadap pengembangan kepribadian mahasiswa dan terakhir adalah bidang karir mahasiswa yang menjadi jembatan wisudawan atau mahasiswa akhir kepada penyedia lapangan pekerjaan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni PT XYZ

Sumber : Data Internal Perguruan Tinggi XYZ

Posisi	Job Description
--------	-----------------

<p>Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni</p>	<p>Pemegang kebijakan, menaungi dan mengkoordinir segala hal berkaitan dengan kemahasiswaan mulai dinyatakan aktif menjadi mahasiswa hingga mahasiswa dinyatakan lulus.</p>
<p>Bidang kegiatan Mahasiswa</p>	<p>Mengkoordinir, mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi dan menyelenggarakan segala jenis kegiatan mahasiswa, kompetisi/perlombaan dan organisasi mahasiswa.</p>
<p>Bidang Kepribadian Mahasiswa</p>	<p>Mengkoordinir, mengembangkan, mendampingi, memfasilitasi dan menyelenggarakan segala kegiatan pengembangan kepribadian mahasiswa seperti latihan kepemimpinan, kompetisi mahasiswa berprestasi, seminar kebangsaan, anti narkoba dan sebagainya.</p>

Bidang Karir Mahasiswa	Penyedia data pengembangan karir mahasiswa dan alumni, penyelenggara pelatihan siap kerja dan <i>job fair</i> , menjadi jembatan antara mahasiswa/alumni dengan penyedia lowongan pekerjaan.
Bidang Administrasi, beasiswa dan asuransi	Mengkoordinir dan mengelola beasiswa, membantu administratif kesekretariatan lembaga, mengurus asuransi dan kebutuhan data/ persuratan berkaitan dengan kemahasiswaan.

Tabel 3.1 *Job description* struktur organisasi Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan dan Alumni Perguruan Tinggi XYZ.

Sumber : Data internal Perguruan Tinggi XYZ.

3.3 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus di perguruan tinggi XYZ. Pendekatan ini lebih menekankan pada informasi kualitatif objek, kejadian atau aktivitas dari sebuah organisasi. Menurut Murdiyanto (2020:32) studi kasus adalah sebuah studi yang mengeksplorasi suatu kasus atau masalah dengan batasan yang mendalam, dengan

pengambilan data yang terperinci, dengan menyertakan berbagai sumber informasi. Penelitian studi kasus merupakan penelitian yang cocok digunakan untuk menggali suatu fenomena dan permasalahan. Peneliti menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin melakukan analisis apakah sistem pengelolaan dana kemahasiswaan dan beasiswa sudah berjalan dengan efektif dan baik dalam rangka mewujudkan *Good University Governance*.

3.4 Metode Pengumpulan Data

3.4.1. Jenis Data dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Primer

Menurut (Sugiyono, 2016) data primer adalah data yang secara langsung peneliti dapatkan dari sumber pertama (bukan perantara) baik individu maupun kelompok. Data primer adalah data yang peneliti dapatkan langsung melalui wawancara langsung dengan manajemen atau pengelola lembaga pengembangan kemahasiswaan perguruan tinggi XYZ. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terkait sistem pengelolaan dan penerapan GUG pada Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan perguruan tinggi XYZ.

2. Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2006:253), data sekunder adalah data yang peneliti dapatkan secara tidak langsung (melalui perantara), misalnya berupa bukti, catatan, laporan historis maupun dokumentasi. Data sekunder dalam penelitian adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah tersedia contohnya gambaran umum, struktur organisasi, garis wewenang, *job description* dan laporan historis pengelolaan dana kemahasiswaan dan dana beasiswa.

3.4.2 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2015), sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan sebagai responden namun disebut sebagai narasumber atau informan dalam penelitian. Peneliti memilih narasumber berdasarkan fungsi atau jabatan narasumber dalam keikutsertaan pengelolaan lembaga pengembangan kemahasiswaan perguruan tinggi XYZ. Berikut tabel narasumber yang akan di wawancarai oleh peneliti :

No	Narasumber	Wawancara	Sebutan
1	Kepala Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan	Berkaitan dengan Struktur, SOP, penerapan GUG, dan pengelolaan baik beasiswa maupun dana kegiatan mahasiswa.	Narasumber 1

2	Kepala bidang kegiatan mahasiswa	Berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran dan pelaporan dana kegiatan mahasiswa.	Narasumber 2
3	Kepala bidang beasiswa lama	Berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran dan pelaporan dana beasiswa.	Narasumber 3
4	Kepala bidang mahasiswa baru	Berkaitan dengan pengelolaan, penyaluran dan pelaporan dana beasiswa.	Narasumber 4
5	Staff bidang administrasi	Berkaitan dengan proses administrasi dalam kelembagaan pengembangan kemahasiswaan.	Narasumber 5

Tabel 3.2 Daftar Narasumber

Sumber : Peneliti, 2022

3.4.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data gabungan atau triangulasi yang peneliti uraikan sebagai berikut :

1. Wawancara (*Interview*)

Menurut Sugiyono, (2006:260) Wawancara adalah pertemuan dua orang dalam rangka bertukar pikiran, informasi melalui tanya jawab sehingga dapat diterapkan maknanya dalam sebuah topik. Jenis wawancara yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah semi terstruktur, karena jenis wawancara ini dipandang sesuai dengan penelitian deskriptif kualitatif. Dalam wawancara semiterstruktur, item-item pertanyaan yang diberikan bersifat terbuka dimana narasumber yang diajak bicara dapat mengemukakan ide-ide dan pendapatnya, tetapi tetap ada batas tema dan alur pembicaraannya. Peneliti menyiapkan pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah yang ada. Tujuan dilakukannya wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai kondisi masalah yang terjadi, sistem pengelolaan yang digunakan serta penerapan GUG yang diterapkan oleh masing-masing narasumber. Wawancara dilakukan secara langsung atau tatap muka oleh peneliti dan narasumber. Daftar pertanyaan yang akan diajukan dalam wawancara akan peneliti masukan kedalam lampiran.

2. Observasi

Peneliti akan melakukan observasi atau pengamatan ,karena dengan melakukan observasi peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku itu sendiri. Observasi ini dilakukan oleh peneliti untuk melengkapi data penelitian sehingga dapat menggambarkan kondisi dari pengelolaan dan penerapan Good University Governance pada perguruan tinggi XYZ. Dalam

penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan terhadap objek penelitian berupa :

- a) Tempat (*place*), yaitu lingkungan fisik dari perguruan tinggi XYZ. Pengamatan ini dilakukan untuk membantu peneliti lebih memahami dan merasakan kondisi yang diakibatkan oleh keadaan fisik perguruan tinggi XYZ.
- b) Aktor , yaitu pelaku atau orang-orang yang memainkan peran tertentu dalam kelembagaan kemahasiswaan perguruan tinggi XYZ.
- c) Aktivitas (*activity*), peneliti akan mengamati rangkaian kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi XYZ yang berkaitan dengan pengelolaan lembaga kemahasiswaan perguruan tinggi XYZ.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono (2006:270) adalah data yang diperoleh dari dokumen yang merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu seperti tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan adalah gambaran struktur organisasi, profil perguruan tinggi serta *job description* setiap individu yang terlibat dalam pengelolaan lembaga kemahasiswaan.

3.5 Teknik Analisis Data

Setelah mengumpulkan data ,maka tahap selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan analisis data. Menurut Sugiyono (2006 :274) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi,dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit – unit, melakukan sintesa, menyusun ke pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif diskriptif untuk menjawab rumusan masalah yakni :

1. Bagaimana penerapan *Good University Governance* pada Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan di perguruan tinggi XYZ?
2. Bagaimana pembenahan sistem pengelolaan dana kemahasiswaan dan beasiswa pada Lembaga Pengembangan Kemahasiswaan di perguruan tinggi XYZ?

Adapun Langkah-langkah analisis data yang dilakukan adalah :

1. Reduksi data

Peneliti akan mencatat data yang telah diperoleh dari hasil wawancara secara jelas agar lebih mudah dalam merangkum inti dari setiap jawaban yang diberikan oleh narasumber atas pertanyaan yang peneliti berikan. Langkah selanjutnya setelah peneliti selesai melakukan pencatatan hasil wawancara yaitu peneliti akan memberikan kode atau mengelompokan data.

2. Pengelompokan data

Jawaban dari para informan akan dianalisis oleh peneliti, sehingga pada akhirnya peneliti dapat menyimpulkan bagaimana teori *stakeholder* dan penerapan *Good University Governance* yang mendasari pengelolaan lembaga pengembangan kemahasiswaan di perguruan tinggi XYZ.

3. Penyajian data

Setelah peneliti melakukan pengelompokan data, maka peneliti akan menyajikan data tersebut ke dalam bentuk uraian singkat, pola-pola tertentu, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sebagainya.

4. Penarikan kesimpulan

Langkah selanjutnya yang peneliti lakukan setelah mendapatkan jawaban dari data adalah peneliti akan menyimpulkan data sehingga dapat menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang ada.

3.6 Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi beberapa pengujian. Peneliti menggunakan uji kepercayaan (*uji credibility*) terhadap hasil penelitian. Uji keabsahan data ini diperlukan untuk menentukan absah atau tidaknya suatu temuan atau data yang dilaporkan penulis dengan apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data atau kepercayaan data terhadap hasil penelitian

kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi teman sejawat, analisis kasus negatif, dan *member check* (Sugiyono, 2016:121). Berikut uji keabsahan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini :

a) Perpanjangan Pengamatan

Penulis kembali ke lapangan untuk melakukan pengamatan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh maupun menemukan data baru.

b) Ketekunan

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan, penulis dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan benar atau salah.

c) Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Analisis triangulasi yang digunakan dalam penelitian adalah triangulasi sumber yaitu dengan cara membandingkan/meninjau kembali tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda, dalam hal ini membandingkan hasil pengamatan dengan wawancara.

d) Menggunakan member check

Member check adalah proses pengecekan data yang diperoleh penulis kepada pemberi data. Tujuan member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh

data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data ditemukan disepakati oleh para pemberi data maka data disebut valid, sehingga data akan semakin kredibel/dipercaya, maka penulis perlu melakukan diskusi dengan pemberi data agar penafsiran akan data yang diperoleh dapat disepakati.

